

Analisis Standar Kerja UNAMET Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Konflik Timor Timur

Muhammad Rayhan Saepul¹, Anugrah Partogi Sitinjak², Prilla Marsingga³

¹Faculty of Social and Political Science, State University of Singaperbangsa, Indonesia. E-mail: 2110631260032@studet.unsika.ac.id

²Faculty of Social and Political Science, State University of Singaperbangsa, Indonesia. E-mail: 2110631260012@student.unsika.ac.id

³Faculty of Social and Political Science, State University of Singaperbangsa, Indonesia. E-mail: prilla.marsingga@fisip.unsika.ac.id

Abstrak: The resolution of the East Timor conflict involved UNAMET's role as a mediator which raised questions about the effectiveness and success of the work standards implemented by UNAMET in that context. This study aims to analyze UNAMET's work standards as a mediator in resolving the East Timor conflict, especially in fulfilling principles such as impartiality, mutuality, sustainability, complementarity, reflexivity, consistency, accountability and universality. This research uses qualitative methods with literature study analysis. Data was obtained through searching sources related to research, then analyzed to understand UNAMET's role and the application of its work standards in resolving the East Timor conflict. The data used in this research comes primarily from literature discussing UNAMET's role in the East Timor conflict, as well as official reports and documents related to the mission. The results of the analysis show that UNAMET succeeded in carrying out its role as a mediator in resolving the East Timor conflict by complying with the work standards implemented. Through a neutral, comprehensive and coordinated approach, UNAMET was able to facilitate the negotiation process, monitor security and support the creation of a conducive environment for the independence referendum.

Kata Kunci: UNAMET, Konflik, Timor Timur, Mediator

Abstract: Penyelesaian konflik Timor Timur melibatkan peran UNAMET sebagai mediator yang menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan keberhasilan standar kerja yang diterapkan oleh UNAMET dalam konteks tersebut. Studi ini bertujuan untuk menganalisis standar kerja UNAMET sebagai mediator dalam penyelesaian konflik Timor Timur, khususnya dalam memenuhi prinsip-prinsip seperti impartiality, mutuality, sustainability, complementary, reflexivity, consistency, accountability, dan universality. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis studi kepustakaan. Data diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber terkait dengan penelitian, kemudian dianalisis untuk memahami peran UNAMET dan penerapan standar kerjanya dalam penyelesaian konflik Timor Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini terutama bersumber dari literatur yang membahas peran UNAMET dalam konflik Timor Timur, serta laporan dan dokumen resmi terkait dengan misi tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa UNAMET berhasil menjalankan peran sebagai mediator dalam penyelesaian konflik Timor Timur dengan mematuhi standar kerja yang diterapkan. Melalui pendekatan yang netral, komprehensif, dan terkoordinasi, UNAMET mampu memfasilitasi proses perundingan, mengawasi keamanan, serta mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif untuk referendum kemerdekaan.

Keywords: UNAMET, Conflict, East Timor, Mediator

1. Introduction

Yaqing (2018) menggambarkan definisi konflik sebagai sesuatu yang lebih dramatis dan serius. Hal ini merupakan akibat dari keyakinan luas bahwa masyarakat global adalah anarkis, mirip dengan hutan Hobbes, tanpa Leviathan, dimana semua orang berkonflik satu sama lain. Pendekatan subjektif melihat konflik berdasarkan tidak selarasnya tujuan. Konflik dalam konteks ini mencakup berbagai aspek, mulai dari konflik politik militer yang mengarah pada pemisahan dan kemerdekaan sebuah wilayah atau negara. Timor Timur adalah contoh konkrit dimana konflik mencapai tingkat dramatis dan serius yang mengubah jalannya sejarah.

Pelepasan Timor Timur dari Indonesia adalah proses panjang dan kompleks yang diwarnai oleh konflik sosial, politik, dan militer. Setelah pendudukan Indonesia atas Timor Timur pada tahun 1975, gerakan perlawanan kemerdekaan mulai berkembang. Keseriusan konflik Timor Timur juga terlihat pada masyarakat dan infrastruktur.

UNAMET (United Nations Mission in East Timor) adalah sebuah misi yang diluncurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1999 di Timor Timur (sekarang dikenal sebagai Timor-Leste). Misi ini bertujuan utama untuk mengawasi referendum kemerdekaan yang diadakan pada bulan Agustus dan September tahun tersebut. Referendum ini memungkinkan penduduk Timor Timur untuk memilih apakah mereka ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia atau mendapatkan kemerdekaan sebagai negara yang merdeka. Tujuan utama UNAMET adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif selama pemungutan suara. Hal ini termasuk mengawasi keamanan, memfasilitasi proses pemungutan suara, dan memberikan perlindungan kepada warga Timor Timur yang berpartisipasi dalam referendum.

Dengan mandat untuk melakukan monitoring serta melaksanakan jejak pendapat. UNAMET terdiri dari para ahli dengan komposisi 1.148 staf ahli internasional, 275 polisi internasional serta 4000 pegawai daerah Timor Timur. Keterlibatan UNAMET membuka jalan penyelesaian konflik di Timor Timur. Dalam prosesnya dalam menjalankan mandat, UNAMET melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugis (pemerintah otoritas yang diakui oleh PBB) serta pihak pro kemerdekaan. Langkah ini dinilai sebagai pengambilan langkah yang tepat, akhirnya terjadi kesepakatan untuk melakukan jejak pendapat. Jejak pendapat akhirnya menunjukkan bahwa 78% rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka dan melepaskan diri dari Indonesia.

2. Method

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, metode kualitatif adalah pendekatan yang mendalam dalam memahami fenomena sosial dengan menekankan pada konteks sosial berupa interpretasi subjek dan data. Penelitian menggunakan metode kualitatif sering kali dilakukan karena lebih dalam memahami bagaimana individu atau kelompok, hal ini terlihat pada bagaimana individu dan kelompok memberikan makna.

Pada penelitian ini data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yang terkait dengan judul penelitian yaitu guna menemukan teori dan pembahasan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pengambilan data melalui studi kepustakaan penulis berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai peranan UNAMET berdasarkan prinsip standar kerja dalam penyelesaian konflik Timor Timur.

Untuk melakukan penelitian ini penulis melalui tahapan pertama yakni, mencari sumber data yang kredibel dan sejalan dengan judul yang penulis pilih. Pada tahapan selanjutnya yakni pengembangan ide, hal ini terlihat pada sumber yang dimasukkan telah mengalami parafrase untuk menghindari plagiarisme. Serta, untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penelitian yang dilakukan.

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan di mana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian memeriksa kembali kesahihan interpretasi dengan mengecek ulang deskripsi dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan.

3. Result and Discussion

Timor Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia, sebelum bergabung menjadi salah satu provinsi Indonesia secara resmi ada konflik di daerah tersebut yang berlangsung pada tahun 1975-1976. Walaupun sudah tergabung menjadi bagian Indonesia konflik di provinsi Timor Timur tidak berhenti disitu saja masih banyak konflik terjadi disana sampai dengan pada tanggal 30 Agustus 1999 dan berhasil menang hingga akhirnya berpisah kembali dengan Indonesia dan berganti nama menjadi Timor Leste.

Konflik yang terjadi di Timor Timur melibatkan dua kelompok masyarakat yang terbagi secara ideologis, yakni pro kemerdekaan dan pro integrasi Indonesia. Konflik keduanya merupakan sebuah konflik panjang yang diwarnai dengan berbagai peristiwa seperti pembunuhan, kekerasan, serta aksi teror yang bukan terjadi pada kedua kelompok tetapi kepada seluruh masyarakat Timor Timur pada umumnya. Setidaknya 18.600 rakyat sipil menjadi korban dua

kelompok tersebut.

Konflik kedua kelompok ini memuncak pada tahun 1998, tepatnya pada saat pemerintah Indonesia sebagai pemegang otoritas atas Timor Timur mengalami krisis politik. Krisis politik ini dimanfaatkan oleh kelompok pro kemerdekaan untuk mengumpulkan kekuatan untuk menuntut kemerdekaan. Hal ini membuat pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Dengan dibantu oleh kelompok pro integrasi Indonesia, pemerintah Indonesia bermaksud untuk mempertahankan Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia. Konflik terbuka pun terjadi banyak orang menjadi korban dari konflik ini sehingga mengundang perhatian dunia. PBB, sebagai organisasi internasional yang merupakan perpanjangan tangan dari negara-negara di dunia mencoba masuk untuk melakukan tindakan pengamanan. Setelah melakukan perundingan dengan pemerintah Indonesia, akhirnya PBB diizinkan masuk oleh pemerintah Indonesia.

3.1. Peranan UNAMET Sebagai Mediator

Kemudian sesuai mandat DK PBB dengan resolusi 1246 tahun 1999 dimodifikasi dan diperpanjang dalam resolusi 1257 tahun yang sama dan resolusi 1262 beberapa bulan kemudian, maka dibentuk tim atau institusi ad hoc yang dinamakan United Nations Missions In East Timor (UNAMET) sekaligus menjadi nama misi PBB, dengan mandat untuk melakukan monitoring serta melaksanakan jejak pendapat. UNAMET terdiri dari para ahli dengan komposisi 1.148 staf ahli internasional, 275 polisi internasional serta 4000 pegawai daerah Timor Timur. Keterlibatan UNAMET membuka jalan penyelesaian konflik di Timor Timur. Dalam prosesnya dalam menjalankan mandat, UNAMET melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugis (pemerintah otoritas yang diakui oleh PBB) serta pihak pro kemerdekaan. Langkah ini dinilai sebagai pengambilan langkah yang tepat, akhirnya terjadi kesepakatan untuk melakukan jejak pendapat. Jejak pendapat akhirnya menunjukkan bahwa 78% rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka dan melepaskan diri dari Indonesia.

Sampai di titik ini solusi terhadap konflik antara rakyat Timor Timur pro integrasi Indonesia dan pro kemerdekaan telah tercapai secara de facto. Namun konflik atau kekerasan antara dua kelompok ini belum juga usai. Atas dasar penolakan hasil jajak pendapat, konflik terbuka kembali terjadi bahkan semakin brutal. Sikap saling memusuhi dan aksi pembalasan dendam semakin memperparah keadaan. Sikap ini terjadi karena konflik yang sudah terjadi begitu lama serta tindak kekerasan (penganiayaan dan pembunuhan) yang terjadi selama konflik.

Situasi tersebut menuntut PBB untuk menurunkan pasukan keamanan dan perdamaian (peace enforcement). Melalui resolusi 1264 DK PBB kemudian menurunkan pasukan penjaga perdamaian, hal ini sesuai mandat yang tertuang dalam Chapter VII of UN Charter, dimana PBB dituntut untuk pengelolaan perdamaian dan keamanan dunia. Pasukan perdamaian PBB kemudian hadir diawali oleh International Force in East Timor (INTERFET) satuan pasukan keamanan diluar koordinasi PBB yang kemudian bersama dengan pasukan perdamaian PBB memiliki mandat untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan Timor Timur, menjaga serta mendukung UNAMET dan organisasi internasional lain yang berfokus kepada bantuan kemanusiaan. Pasukan PBB dan INTERFET terdiri dari 11.000 tentara terdiri dari 22 negara dengan pimpinan dibawah komando Australia.

Tujuan dari UNAMET (United Nations Mission in East Timor) dalam konflik Timor Timur adalah untuk membantu masyarakat Timor Timur dalam proses pemerintahan dan pembangunan setelah referendum independensi yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999. UNAMET bekerja sama dengan lintas partai politik dan militer untuk mengatur dan mengawasi proses pemerintahan dan pembangunan. Tujuan utama UNAMET dalam konflik Timor Timur adalah:

1. Pengaturan dan Pengawasan: UNAMET bekerja sama dengan lintas partai politik dan militer untuk mengatur dan menjalankan proses pemerintahan dan pembangunan. UNAMET melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugal (pemerintah otoritas yang diakui oleh PBB) serta pihak pro kemerdekaan. Langkah ini dinilai sebagai pengambilan langkah yang tepat, akhirnya terjadi kesepakatan untuk melakukan jejak pendapat. Jejak pendapat akhirnya menunjukkan bahwa 78% rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka dan melepaskan diri dari Indonesia.
2. Pengurusan Konflik: UNAMET membantu dalam pengurusan konflik antar partai politik dan antar militer, serta mengawasi hak asasi manusia dan keselamatan masyarakat Timor Timur. Konflik yang berlangsung cukup Panjang di Timor Timur membuat UNAMET memiliki tugas lain dalam menjaga keamanan dan juga meminimalisir jatuhnya korban yang dimana hal tersebut melanggar keamanan dan juga hak asasi manusia di daerah Timor Timur.

UNAMET melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Timor Timur, konflik yang melibatkan banyak pihak ini perlu menemukan solusi yang tepat agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan, tindakan pasti yang dijalankan oleh UNAMET antara

lain, membentuk staf ahli internasional sebanyak 1.148 staff, selain itu untuk upaya pengamanan dan keamanan UNAMET mengumpulkan 257 polisi internasional serta 4000 pegawai di daerah Timor Timur. Dalam menjalankan tugasnya UNAMET membukakan jalan untuk kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi yang akhirnya berujung pada referendum dan dimenangkan oleh pihak Timor Timur pro kemerdekaan.

Sampai di titik ini kesepakatan antar pihak Timor Timur pro kemerdekaan dan pihak yang berintegritas dengan Indonesia telah mencapai *de facto*. Namun konflik antara kedua belah pihak tidak kunjung usai bahkan konflik yang terjadi semakin brutal, tindak kekerasan, ancaman, bahkan pembunuhan timbul semakin banyak. Hal ini menjadi perhatian utama UNAMET dalam pemecahan masalah yang terjadi antara dua kelompok tersebut yang bagaimana ketika keputusan yang sudah mencapai *de facto* harusnya bisa diterima berbagai pihak malah kembali menimbulkan sebuah konflik yang berkelanjutan bahkan jauh lebih parah dari sebelumnya.

3.2. Prinsip Standar Kerja Yang Dilakukan UNAMET

Menurut Hugh Miall dan Christopher Mitchell (1999), ada delapan poin yang harus dipenuhi oleh suatu negara atau organisasi internasional. Prinsip-prinsip komunitas internasional dalam penyelesaian konflik didasarkan pada delapan kriteria: *impartiality*, *mutuality*, *sustainability*, *complementary*, *reflexivity*, *consistency*, *accountability*, dan *universality*. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan dan norma bagaimana pihak ketiga dapat berpartisipasi dan diakomodasi dalam sengketa untuk mencegah pihak asing yang berkepentingan khusus mengaburkan sengketa dan proses penyelesaiannya.

Penulis menggunakan indikator pertama sebagai awalan untuk menilai standar kerja UNAMET, sekaligus untuk melihat apakah UNAMET membantu penyelesaian konflik yang terjadi di Timor Timur dengan prinsip menjunjung tinggi netralitas atau tidak. Indikator pertama adalah *Impartiality*, indikator ini menegaskan bahwa dalam proses resolusi konflik belum bisa dikatakan selesai sampai pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan konflik mendapatkan kepentingannya dan merasa terlindungi.

Di pihak UNAMET sendiri, nampaknya ada kewaspadaan ekstra terhadap dengan siapa saja UNAMET untuk bekerjasama. Meskipun UNAMET sepakat bekerjasama dengan komisi perdamaian dan stabilitas yang dibentuk pemerintah Indonesia dalam hal ini memformulasi aturan-aturan teknis yang berkaitan dengan masalah jejak pendapat, UNAMET sangat selektif menerima kehadiran kelompok-kelompok yang hendak berpartisipasi sebagai pengamat dan pengawas jejak pendapat.

Dalam hal ini UNAMET sangat hati-hati dalam pengambilan keputusan karena banyak pihak yang mencurigai dan menganggap bahwa UNAMET memiliki kepentingan lain selain untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Timor Timur, ketatnya proses seleksi untuk menjadi bagian dari UNAMET menunjukkan bahwa mereka sangat waspada terhadap pihak-pihak yang dianggap tidak menjunjung tinggi netralitas, serta menjaga komitmen untuk tetap bersikap netral, dan tidak mendapatkan intervensi dari pihak pemerintah Indonesia maupun kelompok pro kemerdekaan Timor Timur.

Dalam laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR), disebutkan bahwa UNAMET membangun aparat keamanan yang netral politik dan profesional, serta membantu mengatur pemilihan yang adil dan transparan. Selain itu, UNAMET juga menjadi penghubung antara wartawan asing dan petinggi ITFET (Interfet) jika ada materi berita yang ingin ditanyakan atau sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa UNAMET menjadi pihak netral yang membantu memastikan referendum Timor Timur berjalan dengan transparan dan adil, tanpa memiliki kepentingan politik yang berpengaruh dalam konflik tersebut.

Penulis menganalisis prinsip UNAMET dengan menggunakan indikator lainnya untuk melihat apakah UNAMET membantu penyelesaian konflik yang terjadi di Timor Timur dengan prinsip menjunjung tinggi netralitas atau tidak memihak kepada kelompok manapun serta memperhatikan kepentingan yang didapatkan oleh setiap kelompok dengan seadil-adilnya. Indikator kedua yakni Mutuality.

Prinsip Mutuality, mensyaratkan bahwa dalam melakukan intervensi setiap pihak yang terlibat harus terbuka dalam intervensi tersebut dan dilihat sebagai langkah yang positif. Untuk menerapkan prinsip Mutuality, UNAMET tidak "berat sebelah" ia pun membentuk komisi dengan pemerintah Indonesia dengan membangun Komisi Perdamaian dan Stabilitas. Tujuan dari pembentukan komisi ini adalah sebagai bentuk andilnya pemerintah Indonesia dalam setiap perundingan-perundingan.

Untuk menunjukan ketidak berat sebelah, UNAMET memfasilitasi seluruh kegiatan yang merujuk pada operasi perdamaian baik untuk pihak Timor Timur pro kemerdekaan maupun untuk pemerintah Indonesia, hal ini ditunjukan dengan berhasilnya UNAMET mengajak seluruh kelompok-kelompok yang bertikai untuk menandatangani kesepakatan untuk menghentikan konflik dengan cara-cara kekerasan pada tanggal 18 Juni 1999. Selain itu juga untuk memberikan transparansi terhadap publik UNAMET juga membangun aparat keamanan yang netral politik dan profesional, serta mengatur seluruh kebijakan yang transparan.

Penulis menganalisis prinsip UNAMET dengan menggunakan indikator lainnya untuk melihat apakah UNAMET membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di Timor Timur dengan prinsip menjunjung tinggi netralitas atau tidak memihak kepada kelompok manapun serta memperhatikan kepentingan yang didapatkan oleh setiap kelompok dengan seadil-adilnya. Indikator ketiga yakni Sustainability.

Sustainability, memiliki makna bahwa jika pihak yang akan melakukan intervensi tidak berani untuk bekerja dalam waktu lama yang dibutuhkan dalam penyelesaian sebuah konflik, maka sebaiknya jangan pernah melakukan intervensi karena sia-sia hanya akan menambah kerumitan sebuah masalah.

Hal ini tercermin pada UNAMET sendiri, dimana UNAMET berusaha sebagai pihak ketiga yang berlaku adil untuk kedua belah pihak. Untuk menerapkan prinsip Mutuality, UNAMET tidak "berat sebelah" ia pun membentuk komisi dengan pemerintah Indonesia dengan membangun Komisi Perdamaian dan Stabilitas. Tujuan dari pembentukan komisi ini adalah sebagai bentuk andilnya pemerintah Indonesia dalam setiap perundingan-perundingan.

Penulis menganalisis prinsip UNAMET dengan menggunakan indikator lainnya untuk melihat apakah UNAMET membantu penyelesaian konflik yang terjadi di Timor Timur dengan melibatkan beberapa pihak yang melakukan intervensi maka UNAMET bisa menjamin bahwa kedua belah pihak dapat sampai kepada kesepakatan bahwa intervensi yang mereka lakukan saling melengkapi indikator keempat yakni Complementary.

Complementary, yang memiliki definisi mengimplikasikan bahwa jika penyelesaian sebuah konflik melibatkan beberapa pihak yang melakukan intervensi, maka masing-masing pihak harus sampai pada kesepakatan bahwa intervensi yang mereka lakukan saling melengkapi.

Prinsip Complementary mengimplikasikan bahwa INTERFET dan Pasukan PBB bekerja bersama untuk mencapai kesepakatan yang saling melengkapi dalam menyelesaikan konflik tersebut. INTERFET, sebagai pasukan gabungan di luar koordinasi PBB, awalnya bertindak untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan di Timor Leste. Kemudian, setelah kedatangan Pasukan PBB, keduanya bekerja bersama dengan mandat untuk mendukung UNAMET dan organisasi internasional lain dalam bantuan kemanusiaan, menggunakan kapabilitas militer mereka, serta menjadi fasilitator operasi kemanusiaan.

Dengan kolaborasi antara INTERFET dan Pasukan PBB, konflik di Timor Leste dapat diatasi dengan lebih efektif. Pasukan PBB dan INTERFET terdiri dari 11.000 tentara dari 22 negara dengan Australia memimpin komando. Dalam hal ini terlihat bagaimana adanya kolaborasi yang baik, walaupun hal tersebut berupa intervensi namun bisa disepakati oleh kedua belah pihak.

Penulis menganalisis prinsip UNAMET dengan menggunakan indikator lainnya untuk melihat apakah UNAMET membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di Timor Timur dengan prinsip menjunjung tinggi netralitas atau tidak memihak kepada kelompok manapun serta memperhatikan kepentingan yang didapatkan oleh setiap kelompok dengan seadil-adilnya. Indikator ketiga yakni Reflexivity.

Reflexivity, memiliki definisi yang menjadi pegangan bahwa motivasi keinginan dan tujuan dari setiap pihak yang ingin menyelesaikan konflik haruslah baik. Hal ini terlihat pada perdamaian yang diusulkan oleh pihak Indonesia dan Timor Timur, tercermin pada motivasi dan keinginan penyelesaian konflik yang berbeda. Pihak Indonesia menginginkan penyelesaian konflik sebagai masalah persatuan anti kolonial, sedangkan pihak Timor Timur menginginkan penyelesaian konflik sebagai masalah pribadi.

Disinilah peranan UNAMET bekerja, UNAMET mengadakan negosiasi dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugis serta pihak pro kemerdekaan untuk menyelesaikan konflik. UNAMET membantu menggalang kekuatan untuk menarik perhatian dunia terhadap konflik di Timor Timur. UNAMET mengembangkan program pembangunan perdamaian pasca konflik lintas sektor. UNAMET mengadakan referendum untuk menentukan apakah Timor Timur akan tetap menjadi bagian dari Indonesia sebagai wilayah otonomi khusus atau terpisah.

Penulis menganalisis prinsip UNAMET dengan menggunakan indikator lainnya untuk melihat apakah UNAMET membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di Timor Timur dengan prinsip menjunjung tinggi netralitas atau tidak memihak kepada kelompok manapun serta memperhatikan kepentingan yang didapatkan oleh setiap kelompok dengan seadil-adilnya. Indikator keenam yakni Consistency.

Consistency, yang dimana mediator harus menunjukkan bahwa setiap suasana atau kondisi yang sama mendapat jaminan untuk mendapatkan respon yang sama.

UNAMET telah membantu dalam menjamin perdamaian dan keadilan dalam referendum tersebut, yang diperlukan untuk menjamin perdamaian dan keadilan dalam proses kemerdekaan Timor Timur. Referendum tersebut diadakan untuk menentukan apakah Timor Timur akan tetap menjadi bagian dari Indonesia sebagai wilayah otonomi khusus atau terpisah. Peranan UNAMET dalam menjamin bahwa setiap suasana atau kondisi yang sama mendapat jaminan untuk mendapatkan respons yang sama antara Indonesia dan Timor Timur meliputi pengawasan dan pengelolaan pemilu yang demokratis dan transparan, serta pengendalian konflik dan kekerasan yang terjadi setelah referendum tersebut.

Dalam hal ini, UNAMET telah menjadi suatu faktor yang mendukung penyelesaian konflik di Timor Timur, yang diperlukan untuk menjamin penyelesaian dan keadilan dalam proses perdamaian Timor Timur. Hal ini terlihat dari upaya UNAMET dalam membentuk sebuah badan pengawasan yang melibatkan kedua belah pihak, selain itu UNAMET selalu melakukan perundingan dengan melibatkan kedua belah pihak agar tercipta sebuah keputusan yang bisa disetujui oleh kedua belah pihak serta menjamin bahwa UNAMET bertindak netral.

Penulis menganalisis prinsip UNAMET dengan menggunakan indikator lainnya untuk melihat apakah UNAMET membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di Timor Timur dengan prinsip menjunjung tinggi netralitas atau tidak memihak kepada kelompok manapun serta memperhatikan kepentingan yang didapatkan oleh setiap kelompok dengan seadil-adilnya. Indikator ketujuh yakni Accountability.

Accountability, yang mengacu pada hubungan antara pihak yang melakukan intervensi termasuk siapapun yang mereka wakili, dimana selain menjadi sponsor mereka juga harus siap dengan segala resiko atau imbas dari konflik.

Dalam hal ini PBB sebagai pihak yang paling utama menjadi sponsor dalam penyelesaian konflik di Timor Timur, bisa dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh PBB dalam penyelesaian konflik ini PBB membentuk banyak badan perdamaian yang dimana dalam hal ini melibatkan banyak pihak. Upaya PBB ini terlihat jelas dari awal pembentukan UNAMET itu sendiri, selain UNAMET PBB juga membentuk badan perdamaian dari adanya konflik seperti INTERFET yang berisikan pasukan militer dan juga kepolisian. PBB pun memiliki tanggung jawab moral akan konflik ini, maka dari itu PBB berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan konflik Timor Timur ini. Seluruh upaya yang dikerahkan sangatlah maksimal.

Penulis menganalisis prinsip UNAMET dengan menggunakan indikator lainnya untuk melihat apakah UNAMET membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di Timor Timur dengan prinsip menjunjung tinggi netralitas atau tidak memihak kepada kelompok manapun serta memperhatikan kepentingan yang didapatkan oleh setiap kelompok dengan seadil-adilnya. Indikator ketujuh yakni Universality.

Universality, menandakan bahwa para pihak yang melakukan intervensi haruslah diterima dari semua kalangan terutama secara budaya.

UNAMET di bentuk pada tanggal 11 Juni 1999, UNAMET sendiri lanjutan dari perjanjian Tri Partit pada tanggal 5 Mei 1999. Pada awalnya UNAMET sendiri mendapatkan kecurigaan dari pihak pemerintah Indonesia, pihak pemerintah Indonesia mencurigai UNAMET dan menganggap

bahwa UNAMET tidak netral dalam menyelesaikan konflik ini dan lebih berpihak kepada pihak pro-kemerdekaan. Namun UNAMET membuktikan bahwa mereka bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak manapun dan berpegang teguh bahwa mereka tidak memiliki kepentingan lain dalam penyelesaian konflik ini. UNAMET membuktikan dengan membentuk komisi dengan pemerintah Indonesia dengan membangun Komisi Perdamaian dan Stabilitas, selain itu UNAMET juga selalu melakukan perundingan dengan kedua belah pihak agar seluruh kebijakan yang dikeluarkan bisa diterima secara menyeluruh oleh kedua belah pihak serta semua berjalan secara transparan.

Bukti bahwa UNAMET (United Nations Assistance Mission in East Timor) dapat diterima baik oleh seluruh pihak dalam penyelesaian konflik Timor Timur terdiri dari berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti. Referendum kemerdekaan Timor Timur pada tahun 1999, yang diiklankan oleh PBB (Komisi Perbatasan Portugis), di mana sebagian besar penduduk Timor Timur memilih opsi merdeka. Pembukaan jalan penyelesaian konflik di Timor Timur, yang tercapai secara de facto. Pengawasan dan pengelolaan pemilihan yang demokratis dan transparan, serta pengendalian konflik dan kekerasan yang terjadi setelah referendum tersebut. Peran UNAMET dalam menjamin bahwa setiap suasana atau kondisi yang sama mendapat jaminan untuk mendapatkan respon yang sama antara Indonesia dan Timor Timur. Dalam hal ini, UNAMET telah menjadi faktor yang mendukung penyelesaian konflik di Timor Timur, yang diperlukan untuk menjamin penyelesaian dan keadilan dalam proses perdamaian Timor Timur, dan sudah terlihat bahwa UNAMET diterima di seluruh kalangan yang sedang bertikai.

4. CONCLUSION

Dalam penyelesaian konflik di Timor Timur, peran United Nations Assistance Mission in East Timor (UNAMET) sangat signifikan. UNAMET berhasil memainkan peran sebagai mediator yang netral dan mampu memfasilitasi proses perdamaian dengan memastikan kepentingan semua pihak diakomodasi secara adil. Melalui referendum kemerdekaan pada tahun 1999, yang diawasi oleh UNAMET, mayoritas penduduk Timor Timur memilih opsi untuk merdeka, memastikan bahwa keputusan tersebut diterima secara luas. UNAMET juga berhasil membentuk komisi dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan keterlibatan yang seimbang dalam penyelesaian konflik.

Selain itu, UNAMET berperan dalam pengaturan dan pengawasan pemilihan yang demokratis dan transparan, serta pengendalian konflik dan kekerasan pasca-referendum. Dengan membentuk aparat keamanan yang netral dan profesional, UNAMET membantu memastikan

keadilan dan perdamaian dalam proses pemerintahan dan pembangunan di Timor Timur pasca-referendum. Meskipun peran UNAMET telah membawa kemajuan signifikan dalam penyelesaian konflik di Timor Timur, tantangan masih terus ada. Upaya yang dikerahkan oleh UNAMET dalam memastikan netralitas dan keadilan dalam proses perdamaian harus dipertahankan, sementara keberlanjutan perdamaian dan pembangunan di Timor Timur tetap menjadi fokus utama.

Dengan demikian, kesuksesan UNAMET dalam penyelesaian konflik di Timor Timur menunjukkan pentingnya peran mediator yang netral dan komitmen terhadap prinsip-prinsip seperti netralitas, keadilan, dan transparansi dalam menangani konflik berskala internasional. Hal ini terlihat pada UNAMET menerapkan prinsip Impartiality, Mutuality, Sustainability, Complementary, Reflexivity, Consistency, Accountability, dan yang terakhir adalah Universality.

REFERENCES

- Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Boutros Boutros-Ghal. 1996. Introductory Note to An Agenda for Peace, dalam Adam Roberts dan Benedict Kingsbury (ed), United Nations, Divided World: The UN's Roles in International Relations, Oxford: Clarendon Press.
- Bungin, Burhan. 2015. Metodologi Penelitian sosial dan Ekonomi (Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran). Jakarta: Prenada Media Group.
- CAVR. 2005. Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste Ringkasan Eksekutif. Timor Leste: Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- Christopher R. Mitchell. 1981. The Structure of International Conflict, (United Kingdom: Palgrave Macmillan.
- Djohari, O. 1999. Diplomasi RI dalam upaya penyelesaian masalah Timor Timur secara adil, tuntas, menyeluruh dan dapat diterima internasional: Dialog segitiga (Tripartite Talks) 1992-1999 (Doctoral dissertation, FISIP-UI).
- Hamidi. 2005. Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

- Hamzah, Amir. 2019. Metode Penelitian Kepustakaan. Malang: Literasi Nusantara.
- Hasbi, E. (2020). Liputan Referendum Timor Timur: Menatap Saudaraku Semakin Jauh Melangkah. Retrieved from: <https://www.kompas.id/baca/di-balik-berita/2020/08/30/liputan-referendum-timor-timur-menatap-saudaraku-semakin-jauh-melangkah>
- Indrawan, Jerry. 2019. Pengantar Studi Keamanan. Malang: Intrans Publishing.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis (Yogyakarta: BPFE.
- Makarim, Z. A. 2003. Hari-hari Terakhir Timor Timur. Sebuah Kesaksian. Jakarta: Sportif Media Informasindo, hlm. 19-24.
- Melsasail, F. D. 2016. Operasi Perdamaian Berkelanjutan PBB Pasca Konflik di Timor Leste Tahun 1999-2006. Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial, 5(1).
- Mestika Zed. 2008. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Olahkarsablog. 2022. Apa peran mediator dalam conflict resolution. Diakses dari <https://blog.olahkarsa.com/apa-peran-mediator-dalam-conflict-resolution/>
- Purwanto. 2008. Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sekretariat Kabinet RI. 2014. Indonesia-Timor Leste: Meneguhkan Komitmen untuk Konsisten. Retrieved from: <https://setkab.go.id/indonesia-timor-leste-meneguhkan-komitmen-untuk-konsisten/>
- Simon Fisher, dkk. 2001, Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak. Jakarta: The British Council.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Tholkhah, Imam. 2001. Anatomi Konflik Politik di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Wardhani, W & Dugis, V. M. A. (1999). Identifikasi Permasalahan Dan Kendala Misi Bantuan Perserikatan Bangsa Bangsa Di Timor Timur (Unamet). (Laporan Penelitian, Universitas Airlangga).

Winata, B. H. (2016). PERANAN INTERFET (International Force For East Timor) DALAM PROSES PENGEMBALIAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN TIMOR TIMUR TAHUN 1999. (Skripsi, Universitas Lampung.

V. Wiratna Sujarweni. Metodologi Penelitian- Bisnis dan Ekonomi.

Simon Fisher, dkk. 2001, Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak. Jakarta: The British Council.